

ABSTRAK

STUDI KASUS TERHADAP PASAL 10 UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PEMENUHAN HAK ISTERI KORBAN KDRT DI UPT P2TP2A KABUPATEN SLEMAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

Sri Nur Azizah

NIM: 15421129

Apabila kekerasan terjadi maka hilanglah hak-hak sebagai seorang istri, maka diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Khususnya dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang pemenuhan hak istri/korban kekerasan, didalam Pasal tersebut menjelaskan 5 poin diantaranya perlindungan di setiap lembaga hukum dan lembaga sosial, pelayanan kesehatan, kerahasiaan identitas, pendampingan setiap dalam pemeriksaan, dan bimbingan kerohanian. Oleh karena itu penyusun melakukan penelitian di UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman untuk mengetahui langkah apa saja yang dilakukan untuk memenuhi hak perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari kacamatan hukum islam mengenai pemenuhan hak istri.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis dengan pendekatan normatif. Sumber data yang didapatkan dengan wawancara dan dokumentasi, untuk mengambil data tersebut dengan cara wawancara dengan beberapa konselor bidang layanan yang ada di UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman dan dosen pakar hukum.

Hasil penelitian ini bawasannya yang bertanggung jawab penuh tetap suami selagi masih dalam ikatan perkawinan yang sah, dan kesesuaian hak istri selama ini sudah sesuai antara Pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dengan hukum Islam namun kelemahannya UU PKDRT tersebut masih bersifat delik aduan.

Kata Kunci: Pemenuhan hak istri, Korban Kekerasan,

ABSTRACT

Case Study Of Clause 10 Constitution No. 23 Of 2004 Concerning Fulfilment Of The Rights Of Wives As Demostic Violence In UPT P2TP2A Sleman By Law Islamic Perspective

Sri Nur Azizah

NIM: 15421129

If violence occurs, the rights of a wife will be lost, then it is regulated in UU No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Specifically in Article 10 of UU No. 23 of 2004 concerning the fulfillment of the rights of victims of violence, in this Article explains 5 points including protection in every legal institution and social institution, health services, confidentiality of identity, assistance in every examination, and spiritual guidance. Therefore, the authors conducted research at the UPT, (P2TP2A) Center for Integrated Services for the Protection of Women and Children of Sleman Regency to find out what steps were taken to fulfill the rights of women who were victims of domestic violence in terms of Islamic legal provisions regarding fulfilling the rights of wives.

This research uses juridical approach methods with normative approach. Sources of data obtained by interviews and documentation, to retrieve the data by interviewing several service counselors in the UPT, (P2TP2A) Center for Integrated Services for Women and Children Protection Sleman Regency and also by interviewing law expert lecturers.

The results of this research are that the full responsibility of the husband remains while he is still in the bond of the legal marriage, and the conformity of the rights of his wife is in accordance with Article 10 of UU No. 23 of 2004 by Islamic law but the weakness of the Elimination of Domestic Violence Law is still in offense complaints.

Key Word: Fulfillment of the rights of wives, domestic violence.